

countrybution

BIENNALE YOGYAKARTA VII 2003

Utopia dan Moralitas

BINGKAI SENI DI ATAS KARPET NEGARA DAN MASYARAKAT

I Ngrah Suryawan, KETUA REDAKSI KITSCH, BULETIN SENI RUPA KLINIK SENI TAXU DENPASAR, BALI

Kontribusi kesenian pada masyarakat adalah merevisi produksi dan memprovokasi kelas menengah akan kesadaran hedonisnya.

Dari Bali, bayangan saya menyaksikan *event* seni rupa seperti *Biennale* adalah sebuah harapan dan kejutkan akan sebuah perspektif baru. Bersama kawan-kawan, saya sebenarnya punya ekspektasi bahwa ada sesuatu pendalaman dan cara berkesenian yang menyegarkan dari sebuah komunitas dinamis berkesenian seperti Yogyakarta. Dalam *event* besar seperti *Biennale Yogyakarta VII*, harapan itu saya sandarkan.

Ternyata harus saya akui, harapan itu tidak sepenuhnya saya dapatkan pada *Biennale Yogyakarta* kali ini. Justru iklim dinamis dan penuh tendensi dan geng-geng-an itu saya dapatkan saat melihat pameran-pameran di komunitas terpinggir di Yogya, seperti Kelompok Muzara dan tentu masih banyak lagi. Belum lagi cerita bagaimana komunitas "opisid" ini menceritakan bagaimana begitu tuna-acuan dan hancur berlumanya terminologi seni kontemporer yang kini seperti tumbuhnya jamur di musim hujan, kerangka dan sudah barang tentu hangat-hangat hari ayam.

Paling tidak dari *Biennale Yogyakarta VII* ini tendensi itu terjawab. Dari berbagai karya-karya yang ditampilkan, ada sebuah kecenderungan untuk lebih berat pada seni kontemporer, instalasi, dan menjahit seni konvensional (lukisan)—walau dalam satu dua karya masih disisipkan. Ini sebenarnya terlihat jelas dari pernyataan kurator *Biennale* Hendro Wiyanto dalam sebuah tulisannya menjelang *Biennale* bahwa seni lukis telah mati dan kini diambil alih oleh seni kontemporer, instalasi dan *performing art*. Tapi, sayangnya sebuah konsep tradisi *Biennale*—menunjukkan kecenderungan perkembangan dua tahun terakhir kesenian di Yogyakarta—acuan pada seni kontemporer sangat jelas terlihat. Dengan wilayah kontemporer ini—yang pada akhirnya sangat kontekstual dan semuanya—seni menjadi pi-

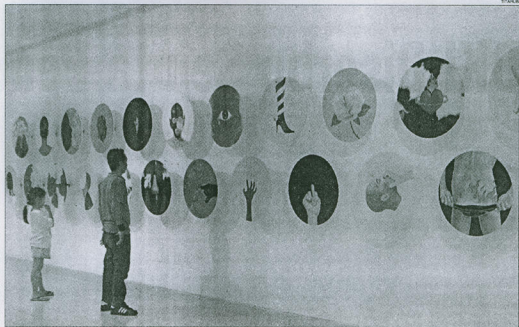
lihan yang sangat gampang dan sangat *enjoy* juga melakukannya, juga dalam bahasa gaulnya *asyik-asyik aja*.

Tapi, dalam *Biennale* kali ini, praktik seni rupa kontemporer di Yogya yang sebenarnya berlagak *coolness, enjoy, asyik-asyik aja, enjoyman* itu terbebani oleh *curatorial rational* yang sangat berat untuk ukuran sineman Yogya yaitu *Countrybution*.

Dengan tajuk dan kerangka kurasi yang sangat kontekstual—mempertanyakan peran serta sineman, *event* seni rupa seperti *Biennale* bagi masyarakat—terlihat jelas keinginan dari *Biennale* ini untuk memetakan dan mengukur, juga menakar peran sineman Yogya dalam kondisi sosial, politik, dan kebudayaan, khususnya di Yogyakarta. Yang menjadi representasi dari kerja kurasi itu adalah

karya-karya sineman kontemporer yang banyak diwakili oleh sineman muda dan banyak juga sineman "manikota" yang diajak untuk mewakili tema *Biennale* kali ini. Dalam pertanggungjawaban kuratorial, Hendro mengatakan bahwa terpilihnya sineman dalam *Biennale* kali ini tidak ditentukan dari perkembangan satu dua karya terakhirnya, tapi lebih kepada paradigma berkesenian dan sudah barang tentu *track record*-nya dalam dinamika berkesenian, khususnya di Yogyakarta. Dari hasil kurasi "ideologis" tersebut, berhasilah dikumpulkan 30-an sineman yang memberikan kontribusi terhadap seni rupa Yogya, (diskusi pertanggungjawaban kuratorial, 18 Oktober 2003).

Dari berbagai argumentasi tidak meyakinkan dari Hendro Wiyanto—yang tidak dimani oleh anggota tim seleksi—terlihat jelas bahwa *Biennale* kali ini memang dipaksakan untuk menjadi sangat ideologis, kontekstual, anti seni lukis, dan sangat kontemporer. Dengan dalil seperti itulah yang bisa menunjukkan bagaimana tema dan konsep kuratorial seni dengan masyarakat dan negara bisa terwakili. Sebenarnya ini tidaklah "salah", tapi semuanya tergantung dari pertanggungjawaban



Moral Skin Fables Karya Agus Suwaga

kuratorial yang meyakinkan untuk menjelaskan semua itu kepada publik. Justru hal inilah yang tidak bisa dilakukan dengan meyakinkan oleh Hendro. Sebagai sebuah visi *Biennale* kali ini bisa menjadi bagian dari perkembangan seni rupa Indonesia. Tapi, jujur saja, memang sangat lemah dari pertanggungjawaban yang diberikan kepada publik.

Satu lagi yang menjadi perdebatan tiada habisnya, seperti lingkaran setan, adalah proses pemilihan seniman dan perspektif menilai kontribusinya. Memang ada lebih dari seribu seniman di Yogyakarta. Memilih 30-an seniman akan mengundang perdebatan tentang pemilihannya. Tapi, semuanya menjadi sah dan menjadi hak dari kurator untuk memilih seniman yang ia anggap bisa mewakili tema *Biennale* yang ia kuratori. Justru pertanggungjawaban yang "sedikit memuaskan" itu yang tidak

bisa dilakukan oleh Hendro dan juga tim sekecil lainnya. Semua jawaban dan argumentasi yang dijelaskan oleh kurator tidak menulik pada persoalan sebenarnya. Satu hal pasti yang menjadi pertanyaan publik ketika melihat *Biennale* dan menyaksikan seniman yang dipilih adalah mengapa seniman A dipilih? Pertanyaan lain yang biasanya adalah apa tema *Biennale* kali ini? Dua pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab balik-balakan oleh tim kerja kurator. Seperti juga yang harus dijelaskan Hendro—tidak dengan penjelasan yang filosofis seperti berkuat-kuat dalam terminologi kontribusi seniman pada masyarakat, pandangan berkesenian, peran seniman dan lainnya—untuk paling tidak memberikan argumentasi meyakinkan pada seniman yang dianggap kontribusinya kecil dan tidak dianggap dalam seni rupa Yogya.

Barisan sakit hati yang tidak

mendapatkan argumentasi meyakinkan dari Hendro dan tim kurasi ini di antaranya adalah Yuswanto Adi, mungkin Agus Kurniawan, dan sudah pasti barisan perupa Bali di Yogyakarta dalam payung Sanggar Dewata Indonesia (SDI). Sebenarnya ada pertanyaan kenapa satu atau dua perupa SDI tidak dipilih? Apakah karena kontribusinya kecil dan tidak dianggap di peta seni rupa Yogya? Ini adalah pertanyaan yang bagi saya belum bisa dijelaskan dengan memuaskan oleh Hendro. Alasan dari Hendro adalah persoalan paradigma berkesenian. Lalu, pertanyaan lanjutannya adalah apakah seniman yang tidak dipilih—termasuk SDI di dalamnya—paradigmanya sudah ketinggalan zaman, kuno, dan tidak mewakili perkembangan dua tahun dari iklim berkesenian di Yogya?

Pada titik inilah menjadi sangat penting peran dari visi dari

pelaksanaan sebuah *Biennale*. Saya yakin Hendro dan tim kurasi sangat memahami ini. Berbagai proses riset, penelitian dan berbagai kerja epistemologi penelitian seni rupa sudah dilakukan dalam kerja kurasinya, tapi yang sangat dilupakan adalah meletakkannya dalam visi penyelenggaraan *Biennale* yang berwujud dan menjadi representasi seni rupa Yogya dua tahun terakhir ini. Rasanya pada titik inilah kelemahan dan cacat yang sangat kentara dalam pelaksanaan *Biennale* ini.

Visi *Biennale* yang mengambal tema kontribusi dan kemudian meletakkannya dalam hubungan seni, negara dan masyarakat, dirisakan sangat berat. Apakah memang benar ini kecenderungan dua tahun terakhir dari seni rupa Yogya? Ini adalah pertanyaan mendasar yang harus dijawab dengan se jelas-jelasnya oleh tim kurasi.

Setidaknya ada banyak para-

doks dan kontradiksi dari kerja kurasi dengan mempertanyakan peran seni dan seniman bagi perubahan masyarakat dan negara ini. Ternyata kerja kurasi yang sangat ideologis, antipasar, dan *agoteks* ini tidak bisa diikuti oleh seniman di Yogyakarta yang ternyata tanpa kesadaran itu. Kalau pun sadar akan perlumannya, ternyata posisinya kini sungguh sangat dilematis.

Seperi misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang arti penting seni dan peran seni publik yang tidak bisa dijawab dengan memuaskan oleh kelompok Silit Gabah dalam *artis talk*. Dengan menghadirkan *performance art*, kelompok sempulan Taring Padi ini berusaha mendekatkan seni pada wilayah publik. Caranya dengan melakukan *performance* yang juga disaksikan oleh masyarakat di depan Taman Budaya Yogyakarta yang adalah pasar. Ini adalah bentuk usaha mendekatkan yang namanya "seni" pada masyarakat pada dua ruang yang berbeda, tempat pameran dan pasar. Dua ruang inilah yang kemudian diterobos dan berpijak pada prinsip seni yang mendekatkan diri pada masyarakat. Sungguh sangat dipukulkan untuk *agoteks*.

Ternyata kerja kurasi yang *agoteks* ini berbeda jauh dari iklim kesenian di Yogyakarta yang ternyata sangat *nyemiman*. Artinya, otoritas sepenuhnya berada di tangan seniman untuk menyembunyikan itu kesenian. Gaya dan prinsip berkesenian pun semuanya yang kemudian dengan mudah diberi label seni kontemporer. Gaya seniman dengan pandangan berkesenian yang *coolies, trendy* ini justru menantang pandangan kesenian.

Berbagai macam perubahan dan kecenderungan baru diterima dengan mentah dan ahistoris. Apa yang dilakukan sekarang dilandaskan pada asyik-asyik saja tanpa pendalaman yang berarti. Itulah kemudian yang dibaca sebagai kecenderungan perkembangan seni rupa Yogyakarta dua tahun terakhir. Untuk menambah "ideologisnya" maka ditancapkanlah tema *Bien-*

nale sangat kontekstual dengan menempatkan hubungan serta peranan seni dengan negara dan masyarakat. Sungguh narasi yang sangat besar, absurd, dan semakin menunjukkan ambiguitasnya peran seniman dan posisi seni dalam perubahan masyarakat.

Pada prinsipnya, peran seniman adalah juga peran kelas menengah. Begitu juga makna dan citra kesenian adalah sangat eksklusif yang bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat. Kontribusi kesenian jika mau diletakkan dalam kontribusinya pada masyarakat adalah mereproduksi dan sekaligus memprovokasi kelas menengah akan kesadaran hedonisnya. Tema *Bienale* kali ini memang sungguh sangat utopis dengan melihat peran seniman dalam perubahan negara dan masyarakat. Pertanyaannya, peran apa yang sudah dilakukan oleh seniman dengan karya seni dan gerakan keseniannya? Tidak lebih dari perwujudan dari masyarakat transisi (kelas menengah) yang sungguh sangat paradoks. Mengharapkan perubahan—dengan mempelekan seni untuk masyarakat, seni publik, seni milik masyarakat—tapi masih memanfaatkan fasilitas kemapanan seperti ruang pameran atau juga citra akan "seni" yang tidak menggeliat pada urat nadi kehidupan masyarakat. Seni menjadi barang yang sangat elite, dinikmati kelas menengah dan telah dikonstruksi menjadi hajat yang dilakukan di ruang-ruang seni mapan seperti galeri-galeri dan museum.

Kontradiksi dan paradoks ini terlihat jelas pada kelompok Daging Tumbuh yang kini salah satu dedengkotnya sudah dirangkul penerbit mapan. Padahal, ideologi mereka jelas karya fotokopian. Jadi, kontribusi seniman yang bisa diharapkan di tengah karpet busuk negara dan masyarakat adalah menambah kebingungan, paradoks, dan ambiguitas. Seperti juga cermin dari masyarakat transisi yang tengah bingung mencari pijakan. Seperti juga *Bienale Yogyakarta VII* yang sangat utopis dan moralis. ●